

**ANALISIS KEBIJAKAN KEAMANAN ENERGI JERMAN DALAM
MENGHADAPI KRISIS ENERGI TAHUN 2022**

(Skripsi)

Oleh

MICHAEL ANGLING DHARMA SAPUTRA

NPM 1816071066



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2025

**ANALISIS KEBIJAKAN KEAMANAN ENERGI JERMAN DALAM
MENGHADAPI KRISIS ENERGI TAHUN 2022**

Oleh

MICHAEL ANGLING DHARMA SAPUTRA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2025

ABSTRAK

ANALISIS KEBIJAKAN KEAMANAN ENERGI JERMAN DALAM MENGHADAPI KRISIS ENERGI TAHUN 2022

Oleh

Michael Angling Dharma Saputra

Pada tahun 2022, konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina mengakibatkan krisis energi yang signifikan di Eropa, dengan dampak yang mendalam pada keamanan energi di berbagai negara, termasuk Jerman. Jerman, sebagai salah satu negara ekonomi terbesar di Eropa dan salah satu pengguna energi terbesar, menghadapi tantangan besar dalam mengatasi dampak dari konflik ini. Ketergantungan Jerman pada gas alam Rusia untuk kebutuhan industri dan domestik membuat negara ini sangat rentan terhadap gangguan pasokan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kebijakan keamanan energi yang diadopsi Jerman untuk menghadapi krisis energi dan dampak kebijakan tersebut pada tahun 2022.

Penelitian ini menganalisis kebijakan keamanan energi Jerman dalam menghadapi krisis energi tahun 2022 menggunakan teori kebijakan publik, teori interdependensi kompleks dan konsep keamanan energi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data studi dokumen. Data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari artikel resmi, berita internasional, dokumen, laporan, jurnal, laporan tahunan, hingga situs resmi.

Hasil penelitian ini menunjukkan kebijakan keamanan energi yang diambil oleh Jerman dipengaruhi juga oleh kebijakan-kebijakan Uni Eropa. Kebijakan keamanan energi Jerman dilihat melalui tiga komponen yang saling berkaitan, yaitu aktor atau pembuat kebijakan, isi kebijakan, dan juga lingkungan. Kebijakan keamanan energi Jerman dapat diklasifikasikan menjadi lima yakni kebijakan terkait diversifikasi energi dan sumber impor, kebijakan transisi menuju energi terbarukan, kebijakan reaktivasi dan penundaan rencana pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara dan nuklir, kebijakan perlindungan sosial, serta kampanye ajakan untuk hemat energi kepada masyarakat untuk mengurangi kebutuhan energi domestik

Kata Kunci: Jerman, Uni Eropa, Krisis Energi, Kebijakan Keamanan Energi

ABSTRACT

ANALYSIS OF GERMAN ENERGY SECURITY POLICY IN FACING THE ENERGY CRISIS IN 2022

By

Michael Angling Dharma Saputra

In 2022, the armed conflict between Russia and Ukraine resulted in a significant energy crisis in Europe, with a profound impact on energy security in various countries, including Germany. Germany, as one of the largest economies in Europe and one of the largest energy users, faces major challenges in overcoming the impact of this conflict. Germany's dependence on Russian natural gas for industrial and domestic needs makes the country highly vulnerable to supply disruptions. This study aims to explore the energy security policies adopted by Germany to deal with the energy crisis and the impact of these policies in 2022. This research analyzes Germany's energy security policies in dealing with the energy crisis in 2022 using public policy theory, complex interdependence theory and the concept of energy security. This study uses a descriptive qualitative research type. This study uses a document study data collection method. The data in this study uses secondary data from official articles, international news, documents, reports, journals, annual reports, and official websites. The results of this research indicate that the energy security policy taken by Germany is also influenced by the policies of the European Union. Germany's energy security policy is seen through three interrelated components, namely actors or policy makers, policy content, and the environment. Germany's energy security policy can be classified into five, namely policies related to energy diversification and import sources, transition policies towards renewable energy, reactivation policies and delays in early retirement plans for coal-fired and nuclear power plants, social protection policies, and campaigns to encourage people to save energy to reduce domestic energy needs

Keywords: Germany, European Union, Energy Crisis, Energy Security Policy

Judul Skripsi : **ANALISIS KEBIJAKAN KEAMANAN
ENERGI JERMAN DALAM MENGHADAPI
KRISIS ENERGI TAHUN 2022**

Nama Mahasiswa : **Michael Angling Dharma Saputra**

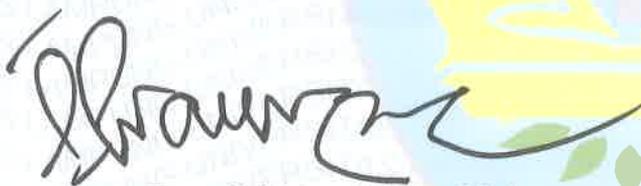
Nomor Pokok Mahasiswa : 1816071066

Jurusan : Hubungan Internasional

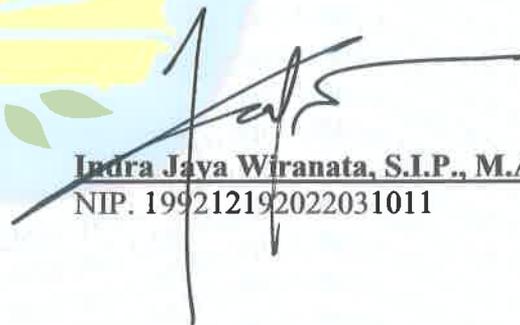
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

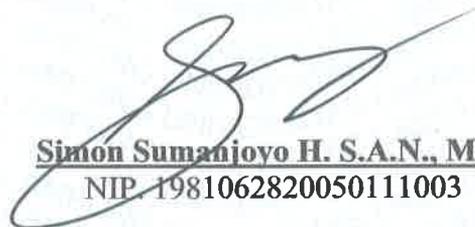


Iwan Sulistyono, S. Sos., M.A.
NIP. 198604282015041004



Indra Jaya Wiranata, S.I.P., M.A.
NIP. 199212192022031011

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

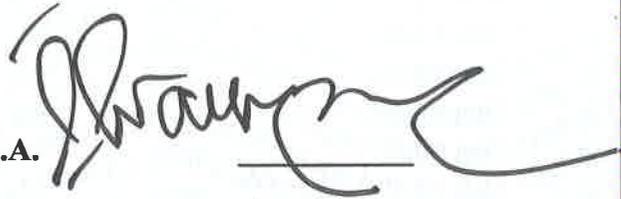


Simon Sumanjaya H. S.A.N., M.P.A.
NIP. 1981062820050111003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

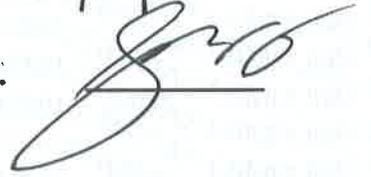
Ketua : Iwan Sulisty, S. Sos., M.A.



Sekretaris : Indra Jaya Wiranata, S.I.P., M.A.



Penguji Utama : Simon Sumanjoyo H. S.A.N., M.PA.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 16 Juni 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandarlampung, 18 Juni 2025
Yang membuat pernyataan,



Michael Angling Dharma Saputra
NPM 1816071066

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap Michael Angling Dharma Saputra, dilahirkan di Kota Bengkulu, provinsi Bengkulu pada tanggal 18 Maret 2000. Peneliti merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Hengly Kurniawan dan Ibu Elisabeth Elsih Lestari. Penulis memiliki satu adik laki laki dan dua adik perempuan dengan nama Rafael, Gabriella, dan Serafine. Peneliti memulai pendidikan formal pada tahun 2004 di Taman Kanak-Kanak (TK) Xaverius Kotabumi yang diselesaikan pada tahun 2006. Kemudian, Peneliti melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar Xaverius Kotabumi pada tahun 2006 yang diselesaikan pada tahun 2012. Selanjutnya, peneliti melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Xaverius Kotabumi pada tahun 2012 yang telah diselesaikan pada tahun 2015. Kemudian, peneliti melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 5 Kota Bengkulu pada tahun 2015 yang telah di selesaikan pada tahun 2018.

Pada tahun 2018, peneliti melanjutkan jenjang pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lampung pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Jurusan Hubungan Internasional melalui jalur SBMPTN. Selama masa perkuliahan, peneliti aktif di berbagai organisasi yang ada di Unila, seperti Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Katolik Universitas Lampung sebagai anggota aktif dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Selain itu juga aktif sebagai pengurus dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional (HMJ HI) divisi *Academic Affairs* periode 2019-2020. Selain itu, peneliti juga aktif sebagai anggota Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Paduan Suara periode 2019-2020 Universitas Lampung. Peneliti juga aktif dalam kegiatan kepanitiaan seperti menjadi anggota divisi konsumsi di acara HI Weekend pada tahun 2019, anggota divisi

perlengkapan dalam kegiatan Funcamp HI Unila pada tahun 2019, anggota divisi acara dalam kegiatan Musyawarah Besar (Mubes) Hubungan Internasional pada tahun 2019, serta sebagai operator seminar dalam kegiatan *The 1st Internasional Conference on Social Science (ULICoSS)* pada tahun 2020.

Dalam mengimplementasikan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, peneliti melaksanakan pengabdian masyarakat melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berlokasi di Desa Bumi Raya, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara pada bulan Agustus tahun 2021. Kemudian, pada bulan Januari hingga Februari tahun 2023, peneliti melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa Universitas Lampung. Peneliti juga mengikuti SDGs Unila Internship Programme selama enam bulan di SDGs Center Universitas Lampung pada tahun 2021 dan magang di Unit Penunjang Akademik (UPA) Universitas Lampung tahun 2023-2025.

MOTTO

"A journey of a thousand miles begins with a single step."

Lao Tzu

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua saya

Bapak Hengly Kurniawan dan Ibu Elisabeth Elsih Lestari. Terima kasih banyak atas didikan, bimbingan, dukungan, semangat, serta kasih sayang yang diberikan dengan setulus hati kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat, perlindungan dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Kebijakan Keamanan Energi Jerman Dalam Menghadapi Krisis Energi Tahun 2022**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasihat dari berbagai pihak.

Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Bapak Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.PA., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung, dan juga selaku Dosen Penguji Utama. Yang dengan sabar telah memberikan masukan, nasihat dan arahan dalam penyelesaian skripsi;
4. Bapak Iwan Sulisty, S.Sos., M.A selaku Dosen Pembimbing Utama, sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan ilmu, nasihat, bimbingan, serta selalu meluangkan waktu dan sabar dalam membimbing peneliti dari awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi;

5. Bapak Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Kedua, yang telah bersedia meluangkan waktunya, membimbing memberikan banyak masukan, saran dan arahan kepada penulis;
6. Seluruh jajaran Dosen Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung beserta Staff Jurusan yang telah memberikan ilmu, meluangkan waktu, dan membantu penulis dari awal proses perkuliahan hingga penulisan skripsi;
7. Keluarga penulis, Papa Hengly, Mama Elisabeth, Rafael, Gabriella, Serafine yang telah mendoakan, membantu, memberikan dukungan dan hiburan serta motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan studinya.
8. Bapak Dr. Muhammad Sukirlan, M.A., dan Bapak Bambang Riadi, S.Pd., M.Pd. selaku Kepala UPA Bahasa Universitas Lampung, Bapak Gandhi Irawan, Ibu Fasih Kusumawati, serta seluruh staff UPA Bahasa Universitas Lampung yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang telah memberi penulis kesempatan untuk magang, memotivasi, menasihati, dan membimbing penulis selama magang di UPA Bahasa Universitas Lampung.
9. Teman-teman terdekat penulis selama berkuliah di Unila, ada M. Hanif Khairy, M. Calakdo Islami, M. Ghazy Ramadhan, Giovanni Albertine H., Tri Anggi Putri, Leonny Fazri, dan Bintang Patricia H., yang telah banyak berjasa bagi penulis selama perkuliahan.
10. Teman-teman seperjuangan dalam menyelesaikan tugas skripsi

Bandar Lampung, 16 Juni 2025
Peneliti,

Michael Angling D. S.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	iii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Penelitian Terdahulu.....	6
2.2 Landasan Konseptual.....	9
2.2.1 Teori Kebijakan Publik.....	10
2.2.2 Keamanan Energi.....	13
2.2.3 Teori Interdependensi Kompleks.....	15
2.3 Kerangka Pemikiran.....	17
III. METODOLOGI PENELITIAN.....	20
3.1 Jenis Penelitian.....	20
3.2 Fokus Penelitian.....	20
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	21
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	22
3.5 Teknik Analisis Data.....	22
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	24
4.1 Dampak Covid-19 dan Konflik Rusia-Ukraina terhadap Energi.....	24
4.2 Gambaran Umum Dan Kebijakan Keamanan Energi Uni Eropa.....	28
4.3 Gambaran Umum Dan Kebijakan Keamanan Energi Jerman.....	43
4.3.1 Diversifikasi Energi Dan Sumber Impor.....	47
4.3.2 Reaktivasi dan Perpanjangan Masa Operasional PLTB.....	52
4.3.3 Pemberian Paket Bantuan dan Pengurangan Pajak.....	53
V. SIMPULAN DAN SARAN.....	58
5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	65

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pemikiran.....	19
3.1 Teknik Analisis	22
4.1 Grafik kenaikan harga energi Bulan Oktober 2021 – Januari 2022.....	25
4.2 Konsumsi Energi Jerman Tahun 2019-2020.....	26
4.3 Konsumsi Energi Jerman Tahun 2020-2021	27
4.4 Infografis berbagai kebijakan Uni Eropa terkait krisis energi 2022	31
4.5 Diagram pilar utama rencana REPowerEU	38
4.6 Kampanye ‘Playing My Part’	39
4.7 Komposisi konsumsi energi Jerman tahun 2020-2021	43
4.8 Komposisi energi sebagai sumber tenaga listrik di Jerman tahun 2021	44
4.9 Profil negara asal gas yang dikonsumsi di Jerman.....	48

DAFTAR SINGKATAN

- UE : Uni Eropa
- IEA : Internasional Energi Agency
- DW : Deutsche Welle
- LNG : Liquefied Natural Gas
- AGEB : AG Energiebilanzen e.V.
- IGO : Internasional Governmental Organization
- ESMA : European Securities and Markets Authority
- ACER : Agency for the Co-operation of Energy Regulators
- REMIT : Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency
- RRF : Recovery and Resilience Facility
- FSRUs : Floating Storage and Regasification Units

I. PENDAHULUAN

Skripsi ini menelaah kebijakan keamanan energi Jerman dalam menghadapi krisis energi tahun 2022. Penelitian ini penting dan layak untuk dilakukan atas landasan empiris, serta kebaruan yang ditemukan oleh peneliti. Maka dari itu, pada latar belakang penelitian ini, peneliti menyajikan situasi keamanan energi di Eropa, terkhusus Jerman, yang belum pulih dari resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19, tetapi mengalami krisis energi akibat konflik Rusia-Ukraina serta justifikasi teoritis dan empiris dengan menggunakan teori dan konsep terkait, yaitu *public policy theory*, konsep *energy security*, dan *complex interdependence theory*. Dalam bab ini pula, peneliti menyajikan, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian ini.

1.1 Latar Belakang Masalah

Energi merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia modern dalam hampir segala aktivitas untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Energi adalah simbol dan perwujudan kemajuan peradaban umat manusia, mengenai bagaimana bentuk dari energi, cara energi diperoleh, bagaimana energi digunakan, bagaimana energi bertransformasi, serta seberapa berpengaruhnya energi bagi kehidupan manusia. Semakin maju peradabannya, maka energi dapat diperoleh dan diolah menjadi berbagai macam bentuk, energi listrik contohnya, yang dapat diperoleh melalui pemanasan air untuk menggerakkan generator dengan bahan bakar seperti batu bara, uranium, dan panas bumi, di mana listrik tersebut kemudian diubah menjadi sumber tenaga untuk memanaskan, menggerakkan, ataupun menghasilkan cahaya untuk berbagai peralatan elektronik (IEA, 2024). Namun, kemajuan peradaban juga berarti semakin meningkatnya kebutuhan energi bagi manusia, sampai ke titik di

mana umat manusia benar-benar ketergantungan kepada energi untuk dapat hidup.

Dalam konteks negara, energi merupakan komponen fundamental dalam bidang sosial dan ekonomi, di mana kebutuhan rumah tangga, transportasi dan industri sangat bergantung pada stabilitas dan ketersediaan energi. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban dalam usaha pemenuhan energi nasionalnya, dari hulu ke hilir, dari memenuhi pasokan energi hingga memastikan bahwa masyarakat mendapatkan akses terhadap energi tersebut. Negara perlu menyusun berbagai kebijakan untuk memenuhi kebutuhan energi nasionalnya, untuk memastikan pemenuhan pasokan hingga penyalurannya hingga di tingkat rumah tangga dapat berjalan dengan baik, serta dapat menanggulangi berbagai kendala dalam pelaksanaannya dengan efisien. Kebijakan keamanan energi diperlukan karena energi bukanlah unsur yang tak terbatas dan mudah diperoleh di mana pun, sehingga risiko terjadinya krisis energi.

Krisis energi secara umum dapat diartikan sebagai situasi di mana proses negara untuk mendapatkan energi terjadi gangguan pasokan dan proses distribusi hingga kepada rakyatnya menjadi terhambat, serta juga dapat dideskripsikan sebagai kondisi di mana masyarakat tidak mampu untuk mengakses energi, yang bisa diakibatkan karena pelemahan ekonomi nasional ataupun kenaikan harga energi yang terlampau tinggi (IEA, 2024). Penyebab krisis pun bisa beragam, mulai dari ketidakstabilan geopolitik global, resesi ekonomi, pasokan cadangan energi dalam negeri yang tidak dapat memenuhi jumlah yang dikonsumsi masyarakat, konflik dalam negeri, hingga sabotase oleh negara atau kelompok kriminal (IEA, 2024).

Pada tahun 2022, konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina mengakibatkan krisis energi yang signifikan di Eropa, dengan dampak yang mendalam pada keamanan energi di berbagai negara, termasuk Jerman. Rusia, sebagai salah satu pemasok energi utama ke Eropa, terutama dalam hal gas alam, mempengaruhi stabilitas pasokan energi di kawasan tersebut (DW, 2022). Krisis ini menyoroti ketergantungan Eropa, termasuk Jerman, pada

energi Rusia, yang sebelumnya dianggap sebagai ancaman jangka panjang tetapi kini menjadi masalah mendesak.

Jerman, sebagai negara ekonomi terbesar di Eropa dan salah satu pengguna energi terbesar, menghadapi tantangan besar dalam mengatasi dampak dari konflik ini. Ketergantungan Jerman pada gas alam Rusia untuk kebutuhan industri dan domestik membuat negara ini sangat rentan terhadap gangguan pasokan. Ketegangan politik dan ekonomi akibat konflik ini memaksa Jerman untuk mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan keamanan energi nasionalnya guna memastikan keberlanjutan dan keamanan pasokan energi.

Krisis energi ini juga berdampak pada kebijakan energi Eropa secara keseluruhan, menggarisbawahi perlunya strategi diversifikasi dan ketahanan energi yang lebih baik. Jerman sebagai bagian integral dari Uni Eropa, berperan penting dalam upaya kolektif untuk meningkatkan keamanan energi dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi yang tidak stabil.

Dalam konteks ini, kebijakan keamanan energi Jerman perlu diteliti secara mendalam untuk memahami bagaimana Jerman mengelola risiko yang timbul dari ketergantungan energi dan konflik geopolitik yang melibatkan salah satu pemasok energinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kebijakan keamanan energi yang diadopsi Jerman untuk menghadapi krisis energi dan dampak kebijakan tersebut pada tahun 2022

1.2 Rumusan Masalah

Embargo impor gas alam oleh Rusia terhadap Uni Eropa sebagai balasan berbagai sanksi yang dilancarkan Uni Eropa sebagai aksi solidaritas terhadap Ukraina sebelumnya memberikan pukulan telak terhadap perekonomian negara-negara Eropa, termasuk Jerman yang sangat bergantung dari pasokan gas alam Rusia. Selain menyebabkan kekosongan pasokan energi, hal ini juga memicu lonjakan harga komoditas energi secara global, yang menyebabkan sebagian besar industrinya harus berhenti beroperasi untuk sementara, masyarakat Jerman harus mengalami pemadaman listrik bergilir, hingga harus

menanggung kenaikan tarif listrik, gas, dan BBM yang akhirnya memperburuk resesi ekonomi.

Pemerintah Jerman harus mengevaluasi kembali kebijakan keamanan energinya untuk mengatasi krisis akibat kekurangan pasokan energi ini secara jangka pendek dan jangka panjang sehingga Jerman tidak lagi bergantung terhadap impor gas alam Rusia. Mencari negara-negara pengganti pemasok gas alam lainnya pada dasarnya hanyalah solusi sementara, dimana *cost-benefit* sangatlah mahal, karena diperlukan infrastruktur khusus untuk pengiriman LNG, serta biaya pengirimannya yang tentu lebih mahal dibandingkan gas Rusia yang dikirim langsung melalui pipa Nord Stream 1 & 2 lain, sehingga diperlukan solusi jangka panjang untuk menghindari krisis serupa dimasa depan. Transisi energi yang sedang berjalan perlu dievaluasi penerapannya dengan mempertimbangkan aspek ketahanan dan berkelanjutan yang berprinsip keadilan, sehingga transisi energi benar-benar menjadi solusi Jerman untuk memenuhi sebagian besar energinya sendiri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Berdasarkan penjelasan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa kebijakan keamanan energi Jerman dalam mengatasi krisis energi tahun 2022?

Pertanyaan ini berfokus pada identifikasi dan analisis kebijakan-kebijakan konkret yang diterapkan Jerman untuk menghadapi krisis energi, intervensi Uni Eropa dalam pengambilan kebijakan energi regional, termasuk langkah-langkah diversifikasi pasokan energi, peningkatan kapasitas energi terbarukan, dan strategi penguatan infrastruktur energi.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan, yakni :

1. Mendeskripsikan krisis energi yang terjadi di Jerman pada tahun 2022; dan
2. Mendeskripsikan kebijakan keamanan energi Jerman terhadap krisis

energi yang terjadi sepanjang tahun 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu Hubungan Internasional khususnya kajian *energy security* Jerman. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan penelitian atau referensi untuk pengambilan kebijakan atau strategi keamanan energi negara.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan tinjauan pustaka yang terbagi dalam tiga bagian. Bagian pertama penelitian terdahulu dilakukan dalam langkah untuk menemukan sumber literatur terkait kelangsungan penelitian sebelumnya dan memberikan referensi bagi peneliti terhadap kebaruan penelitian, pada bagian kedua menguraikan landasan konseptual yang terdiri dari konsep keamanan energi, teori kebijakan publik dan teori saling ketergantungan, lalu pada bagian ketiga dipaparkan kerangka pemikiran yang bertujuan untuk memberikan alur pikir yang diterapkan dalam penelitian ini serta memberikan gambaran mengenai Kebijakan Keamanan Energi Jerman Dalam Menghadapi Krisis Energi Tahun 2022.

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai kebijakan keamanan energi dan dampak konflik internasional sering kali memberikan landasan penting untuk menganalisis situasi terkini, termasuk kasus krisis energi Jerman. Selain sebagai referensi penelitian, penelitian terdahulu juga menyajikan kekurangan dari penelitiannya serta saran bagaimana peneliti selanjutnya mencoba penelitian dengan topik terkait untuk mengisi gap keterbaruan fenomena/studi kasus/data ataupun metodologi penelitian.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan untuk topik penelitian ini yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Behnam Zakeri, Katsia Paulavets, et al, dalam artikel yang berjudul “Pandemic, War, and Global Energy Transitions”, yang diterbitkan oleh *Molecular Diversity Preservation International* (MDPI) dalam jurnal “*Energies*” terbitan tahun 2022 (Behnam, 2022). Penelitian ini berfokus pada isu keamanan energi serta transisi energi

terbarukan selama pandemi covid-19 hingga perang antara Rusia dan Ukraina. Artikel ini membahas mengenai bagaimana dampak covid-19 dan perang terhadap sektor energi di berbagai negara, bagaimana usaha untuk mendorong transisi energi yang berkelanjutan sesuai SDGs 7 tetap relevan di saat krisis, serta menawarkan solusi kebijakan yang dapat diberlakukan bukan hanya dalam jangka pendek, namun juga dalam jangka panjang.

Meskipun pandemi covid-19 dan perang adalah fenomena yang secara alami berbeda, namun dampaknya terhadap sektor energi memiliki kesamaan, yakni menimbulkan gejolak terhadap permintaan dan harga secara drastis, rantai pasok yang terganggu dan investasi energi menjadi terhambat. Dalam penelitian Zakeri dan rekan-rekan penelitiannya, ditemukan bahwa pandemi covid-19 dan perang Rusia-Ukraina sebenarnya bisa menjadi kesempatan untuk titik balik transisi energi rendah karbon, di mana selama pandemi, pola perilaku dan gaya hidup masyarakat secara luas, berubah drastis dalam waktu yang singkat selama kurang lebih dua tahun lamanya yang menunjukkan tren positif terhadap pemulihan alam dan lingkungan. Disisi lain, isu perang menjadikan energi sebagai komoditas yang krusial, di mana perlu untuk mendiversifikasi energi dan kebutuhan akan energi terbarukan domestik.

Namun, pada realitasnya para pemangku kebijakan di seluruh dunia, justru fokus terhadap solusi jangka pendek yang terlihat sebagai solusi instan, seperti mendukung industri energi lama, serta mencari opsi rute/pemasok energi fosil lain sebagai alternatif pengganti dari negara pemasok energi yang sedang berkonflik. Artikel ini ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan, beberapa diantaranya adalah *rethinking consumption*, di mana kebutuhan energi dan konsep konsumsi energi perlu diubah menjadi cara yang berkelanjutan, bertanggung jawab, serta memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia. *Reinventing urban space, infrastructures, and mobility*, yakni pendekatan untuk perubahan tata kota serta digitalisasi untuk memastikan seluruh layanan umum penting terjangkau untuk mengurangi konsumsi bahan bakar akibat ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, serta mempromosikan transportasi publik yang terintegrasi yang ramah lingkungan.

Promoting decentralized and resilient energy systems, yakni mempromosikan energi baru terbarukan yang lebih ramah lingkungan serta terlepas dari rumitnya rantai pasok energi global yang beresiko terhambat. Dan yang terakhir adalah *Ensuring a Just Energy Transition*, di mana negara harus memasukkan akses terhadap energi dalam jaminan perlindungan sosial untuk menjamin layanan energi penting bagi masyarakat miskin dan rentan.

Kedua, penelitian oleh Christoph Halser dan Florentina Paraschiv yang berjudul "*Pathways to Overcoming Natural Gas Dependency on Russia—The German Case*" yang diterbitkan oleh MDPI dalam jurnal *Energies* terbitan tahun 2022 (Paraschiv, 2022). Artikel yang masih dalam jurnal yang sama ini menggunakan Jerman sebagai studi kasusnya. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa gangguan pasokan dari Rusia berdampak kritis pada keamanan pasokan gas alam Jerman. Karena ketergantungan pada gas alam Rusia, Jerman menghadapi tantangan besar dalam mengamankan pasokan gas alam karena kurangnya alternatif impor dan konsekuensi ekonomi negatif dari kekurangan gas yang parah. Christoph Halser dan Florentina Paraschiv merekomendasikan beberapa solusi jangka pendek yang dapat diambil seperti diversifikasi pasokan gas serta mereview kemungkinan pemangkasan *demand* gas di sektor konsumen. Meski ada alternatif impor gas dari Eropa dan luar Eropa dengan LNG, namun untuk mengisi kekosongan pasokan sisanya dapat ditangani dengan pemangkasan penggunaan gas alam sebagai sumber tenaga pembangkit listrik, sehingga perlu mempertimbangkan kembali penggunaan pembangkit listrik berbahan bakar fosil, penggunaan tenaga nuklir, serta meningkatkan produksi listrik dari energi terbarukan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Andryan Juliardy dengan judul "*Masa Depan Gas Alam dan Ekonomi Jerman dalam Konstelasi Perang Rusia-Ukraina*" yang diterbitkan oleh Universitas Katolik Parahyangan dalam jurnal *Sentris* terbitan tahun 2023. Artikel ini memaparkan bagaimana sejarah Jerman yang kebutuhan akan gas alamnya bergantung dengan Rusia, dampak perang Rusia-Ukraina terhadap pasokan gas Jerman, serta bagaimana Jerman mengatasi krisis pasokan gas alamnya. Penelitian ini menggunakan

teori ketergantungan (*dependency theory*) untuk menguak bagaimana ketergantungan Jerman akan impor gas alam Rusia dapat terjadi, hingga implikasinya saat terjadi perang yang mengakibatkan Jerman mengalami dilema. Dampak dari embargo impor dari Rusia terhadap Jerman diantaranya krisis gas alam dan listrik, inflasi akibat biaya energi yang kian mahal, berhenti beroperasinya industri dan PHK massal, hingga krisis ekonomi. Dalam pemenuhan energi panas untuk kebutuhan rumah tangga, Jerman harus mengimpor dari negara-negara Uni Eropa lainnya seperti Norwegia yang telah menggunakan pembangkit listrik dengan energi terbarukan.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Javad Keypour yang berjudul “Replacing Russian gas with that of the United States: A critical analysis from the European Union energy security perspective”. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif ini mengevaluasi seberapa efektif potensi penggantian gas dari Rusia menggunakan LNG asal Amerika Serikat untuk memperkuat keamanan suplai gas Uni Eropa. Dalam penelitian ini menganalisis enam negara, yaitu Jerman, Polandia, Ceko, Austria, Prancis, dan Italia, dalam konteks kemampuan mereka menerima gas LNG dari Amerika Serikat sesuai dengan kebijakan masing-masing negara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa impor gas dari Amerika Serikat dapat meningkatkan keamanan pasokan gas. Namun, penting untuk mempertimbangkan manfaat penggantian ini, mengingat adanya batasan pada infrastruktur yang ada dan faktor-faktor ekonomi yang terlibat.

2.2 Landasan Konseptual

Landasan konseptual ini bertujuan untuk memberikan dasar teori dan konsep yang digunakan dalam analisis kebijakan keamanan energi Jerman dalam menghadapi krisis energi akibat konflik Rusia-Ukraina tahun 2022 . Konsep dan teori ini akan membantu dalam memahami dinamika kebijakan energi Jerman dan memberikan kerangka analisis yang komprehensif.

2.2.1 Teori Kebijakan Publik

Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang direncanakan dengan tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik tertentu. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik bukan hanya keputusan yang datang begitu saja, tetapi program yang dirancang dengan cermat untuk mencapai tujuan tertentu. Program ini juga menunjukkan praktik yang berlaku dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat atau pemerintah. Dalam pengertian lain, kebijakan publik mencakup segala tindakan dan pilihan pemerintah yang berpengaruh pada masyarakat secara luas. Penjelasan ini mengindikasikan bahwa kebijakan publik tidak hanya soal program atau rencana, tetapi juga meliputi efek nyata yang dialami oleh masyarakat (Iriawan, 2024).

Carl I. Friederich menambahkan aspek lingkungan ke dalam definisi kebijakan publik dengan menyatakan bahwa kebijakan publik terdiri dari serangkaian tindakan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam konteks tertentu yang dihadapkan pada ancaman dan kesempatan yang ada. Melalui pandangannya, Friederich mengisyaratkan bahwa kebijakan publik dirumuskan untuk memaksimalkan potensi yang tersedia serta menangani hambatan yang muncul di bidang sosial, politik, atau ekonomi. Usulan kebijakan ini bertujuan untuk merespons berbagai tantangan dan peluang yang ada agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kebijakan publik berfungsi sebagai instrumen untuk menangani dinamika yang terjadi di lingkungan tempat kebijakan tersebut diimplementasikan (Adianto & Maryani, 2014; Iriawan, 2024).

Sementara itu, James E. Anderson menekankan bahwa kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan demi mencapai tujuan tertentu, yang melibatkan satu atau lebih pelaku kebijakan untuk menangani isu-isu yang mereka anggap penting. Ia juga menunjukkan bahwa kebijakan publik cenderung memiliki stabilitas yang relatif. Ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak berubah dengan cepat, tetapi memiliki jangka waktu pelaksanaan yang cukup lama. Sebagai contoh, ketika

terjadi peningkatan jumlah kejahatan di sebuah kota, kebijakan publik yang dibuat untuk mengatasi hal itu bisa meliputi peningkatan keamanan melalui penambahan anggota kepolisian atau inisiatif rehabilitasi bagi pelaku kriminal.

Lalu ada Thomas R. Dye, yang melalui tulisannya yang berjudul “*Understanding Public Policy*” mendefinisikan kebijakan publik sebagai apa pun itu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan maupun tidak dilakukan. Pemerintah melakukan banyak hal, seperti mengatur konflik dalam masyarakat, mengatur masyarakat untuk melanjutkan konflik dengan masyarakat yang lain, mendistribusikan berbagai macam penghargaan simbolis dan layanan material kepada anggota masyarakat dan pemerintah juga memungut pajak dari masyarakat (Dye, 2002). Dengan demikian, kebijakan publik dapat mengatur perilaku, mengatur birokrasi, mendistribusikan manfaat, atau mengambil pajak atau pun keseluruhannya sekaligus.

Menurut Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul “*Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*”, kebijakan publik memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Solichin, 1991):

1. Tindakan yang Mengarah pada Tujuan: Kebijakan publik dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, bukan tindakan yang acak.
2. Keterkaitan antar Keputusan: Kebijakan publik terdiri dari serangkaian keputusan yang saling berkaitan, bukan keputusan yang berdiri sendiri.
3. Implementasi Konkret: Kebijakan publik harus diikuti dengan tindakan nyata oleh pemerintah.
4. Bersifat Positif atau Negatif: Kebijakan publik bisa berupa tindakan aktif pemerintah atau keputusan untuk tidak bertindak.

Thomas R. Dye dalam bukunya “*Understanding Public Policy*” yang diterbitkan tahun 1987, menyebutkan ada enam model perumusan kebijakan publik, yakni model institusional/kelembagaan, model kelompok, model elite, model rasional, model inkremental, dan model sistem. Kebijakan publik menurut Easton (1969) merupakan pemanfaatan strategis terhadap sumber

daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Menurutnya, kebijakan publik merupakan bentuk intervensi negara untuk melindungi kepentingan masyarakat (kelompok) yang kurang beruntung. Berdasarkan definisi tersebut, kebijakan publik merupakan proses pengambilan keputusan (*decision making*). Berdasarkan definisinya, sebuah kebijakan publik akan efisien ketika berada dalam ranah pemerintahan. Artinya, kekuasaan negara dalam kebijakan publik ini sangat besar. Kebijakan publik mengandung tiga komponen penting yang saling berkaitan dalam proses formulasi kebijakan publik, yaitu aktor atau pelaku kebijakan, isi kebijakan, dan lingkungan kebijakan.

Rinfret, dalam bukunya yang berjudul “*Public Policy: A Concise Introduction*”, yang terbit pada 2022, mengategorikan dua kelompok aktor yang terlibat dalam suatu kebijakan, aktor resmi (*official actors*) dan aktor tidak resmi (*unofficial actors*). Aktor resmi adalah individual ataupun organisasi yang disebutkan secara sah dalam hukum memiliki kewenangan dalam pembentukan kebijakan, seperti badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kelompok ini bertanggung jawab dalam perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Aktor tidak resmi adalah pihak lainnya yang ikut dilibatkan dalam pembuatan kebijakan, seperti warga negara, media, kelompok kepentingan dan representasi dari berbagai organisasi.

Dalam kasus kebijakan tertentu perlu diperhatikan pula lingkungan internasional dan kebijakan internasional (Anderson, 1979). Teori sistem menyatakan bahwa pembentukan kebijakan publik tidak terlepas dari dampak lingkungan. Permintaan akan suatu kebijakan dapat muncul akibat faktor-faktor lingkungan dan diolah dalam sebuah sistem politik. Namun, proses penyusunan kebijakan publik yang dihasilkan tentunya mempertimbangkan juga aspek sumber daya alam, kondisi cuaca, bentuk lahan, populasi, penyebaran penduduk, lokasi geografis, budaya, struktur sosial, serta sistem ekonomi dan politik. Lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap isi kebijakan, karena dari lingkungan itulah para pengambil keputusan dapat merancang strategi untuk mengembangkan isi kebijakan bagi masyarakat luas.

Kebijakan publik berfungsi sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan yang mengikat seluruh masyarakat, sehingga para pengambil kebijakan harus memperhatikan asal-usul tuntutan yang muncul terkait dengan kebijakan tersebut.

Isi kebijakan adalah produk dari sebuah formulasi kebijakan yang terwujud dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan daerah. Wujud dari kebijakan publik tersebut tertuang dalam isi kebijakan yang memuat berbagai pertimbangan, penetapan, dan keputusan yang tersusun atas bab-bab dan pasal-pasal hingga aturan-aturan tambahan. Isi dari kebijakan tentu disesuaikan dengan kondisi lingkungan kebijakan itu berasal. Apabila isi kebijakan tidak diarahkan pada suatu kondisi lingkungan yang sesuai, maka kebijakan publik akan gagal diimplementasikan. Isi kebijakan tentu harus menjawab tuntutan masyarakat, sehingga mengakomodasi kepentingan publik, dan bukan hanya kepentingan golongan tertentu.

2.2.2 Keamanan Energi

Keamanan energi dapat dipahami secara sederhana sebagai kondisi di mana ketiadaan ancaman atau perlindungan terhadap ancaman yang dapat mengganggu jaringan pasokan energi. Tidak ada standar khusus untuk mendefinisikan istilah keamanan energi, namun para analis dan peneliti biasanya mendeskripsikannya sebagai terjaminnya pasokan energi yang cukup dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan vital suatu negara, bahkan dimasa konflik dan krisis internasional (Williams, 2018). Keamanan energi merujuk pada upaya dan strategi yang diterapkan oleh negara untuk memastikan pasokan energi yang stabil, terjangkau, dan berkelanjutan. Konsep ini mencakup berbagai aspek seperti diversifikasi sumber energi, perlindungan infrastruktur energi, dan mitigasi risiko terkait pasokan energi (Helm, 2002).

Pada awalnya, konsep keamanan energi merujuk pada permasalahan yang dihadapi negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Jerman, Perancis, dan Inggris yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pasokan energinya secara domestik dan independen, sehingga sangat bergantung terhadap impor dari

negara-negara lain, yang lokasinya berada di kawasan yang tidak stabil dan rawan terjadi konflik (Williams, 2018). Minyak bumi sebagai contohnya, yang merupakan sumber energi utama dunia yang paling berisiko terganggu akibat embargo, terorisme, dan perang, di mana mayoritas negara eksportir ini berlokasi di Timur Tengah dan Afrika yang sangat rawan terjadi konflik (Williams, 2018). Untuk mengurangi dampak akibat gangguan pasokan energi ini, negara-negara konsumen minyak terbesar di dunia ini menerapkan berbagai kebijakan keamanan energi seperti, eksplorasi sumur minyak bumi baru di dalam negeri, membangun cadangan minyak bumi nasional sebagai alternatif bila sewaktu-waktu terjadi gangguan rantai pasok, penerapan standar efisiensi bahan bakar, hingga penempatan pasukan militer di wilayah penghasil minyak bumi.

Setelah itu, keamanan energi dimaknai juga sebagai dilema khusus negara-negara yang sangat bergantung pada satu negara pemasok untuk memenuhi kebutuhan energi mereka, namun memiliki posisi *bargaining power* yang lemah terhadap pemasok tersebut, sehingga rentan terhadap tekanan politik (Williams, 2018). Dalam kasus ini, Uni Eropa, termasuk Jerman di dalamnya, mengalami dilema ini untuk terlibat langsung atau bahkan sekedar menjatuhkan sanksi terhadap Rusia ketika invasi terhadap Ukraina terjadi. Hal ini diakibatkan karena Rusia merupakan pemasok utama energi Uni Eropa, sehingga Rusia bisa memutus pasokan energi sewaktu-waktu yang dapat mengancam ketersediaan pasokan Uni Eropa. Uni Eropa pun bereaksi untuk mengurangi hingga lepas sepenuhnya dari ketergantungan akan impor pasokan energi dari Rusia dalam beberapa tahun mendatang.

Seiring berjalannya waktu, meningkatnya kekhawatiran terhadap perubahan iklim, membuat banyak pemangku kebijakan berupaya memastikan bahwa negara mereka akan memiliki cukup energi untuk memenuhi kebutuhan di masa mendatang sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global (Williams, 2018). Tantangan terbesarnya tentu memerlukan transisi dari ketergantungan utama pada bahan bakar fosil (minyak bumi, batu bara, dan gas alam) ke ketergantungan yang lebih besar

pada tenaga nuklir, tenaga air, dan energi terbarukan, terutama tenaga angin dan matahari, yang keandalan masih diragukan serta biaya investasinya transisi energinya yang sangat mahal dibandingkan bahan bakar fosil.

Perspektif lain keamanan energi juga datang dari negara-negara pemasok energi, yang perekonomiannya sangat bergantung dari ekspor bahan bakar fosil minyak bumi, batu bara dan gas alam, seperti Algeria, Nigeria, Uni Emirat Arab, Kuwait, Arab Saudi, Venezuela, dan negara anggota OPEC lainnya. Ketika permintaan global tidak cukup untuk menyerap pasokan yang tersedia, baik karena kondisi ekonomi seperti krisis keuangan tahun 2008-2009 atau kelebihan pasokan minyak mentah seperti yang terjadi pada tahun 2014-2016, maka perekonomian mereka akan hancur dan kerusuhan sosial dapat terjadi (Williams, 2018). Oleh karena itu, beberapa negara penghasil minyak bumi ini, mulai mengubah portofolio investasi dan penerimaan negara mereka ke sektor energi lain, atau bahkan tidak berkaitan dengan industri energi sama sekali, seperti properti, perbankan, pariwisata, bahkan olah raga.

Definisi dan penerapan keamanan energi beragam sesuai dengan kapabilitas suatu negara dalam memproduksi dan/atau mengonsumsi energi, sektor penopang perekonomian negaranya, posisi geografis negaranya hingga kepentingan nasionalnya. Deskripsi, definisi/perspektif/pendekatan, dan/atau cara memperoleh “keamanan” energi itu akan berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya.

2.2.3 Teori Interdependensi Kompleks

Teori saling ketergantungan (*interdependence theory*) dalam hubungan internasional menjelaskan bagaimana negara-negara saling bergantung satu sama lain dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, politik, dan energi. Teori ini menekankan bahwa hubungan timbal balik antara negara-negara dapat mempengaruhi kebijakan dan strategi mereka.

Model saling ketergantungan kompleks (*complex interdependence*) dikembangkan oleh Robert O Keohane dan Joseph S. Nye pada akhir tahun

1970-an. Model ini merupakan tantangan besar bagi asumsi fundamental realisme tradisional dan struktural yang berfokus pada kemampuan militer dan ekonomi untuk menjelaskan perilaku negara. Sebaliknya, saling ketergantungan kompleks menyoroiti munculnya aktor transnasional terhadap negara. Fokusnya adalah munculnya rezim dan lembaga internasional yang mengimbangi kemampuan militer tradisional dan pentingnya kesejahteraan dan perdagangan dalam masalah kebijakan luar negeri dibandingkan dengan masalah status dan keamanan. Teori saling ketergantungan kompleks sebenarnya menjadi komponen utama dari perspektif neoliberalisme dan telah banyak digunakan dalam analisis politik internasional yang berupaya memahami keinginan negara untuk menjalin aliansi kerja sama satu sama lain dalam kondisi anarki dan ketergantungan.

Sambil menekankan semakin pentingnya Organisasi Internasional (IO) dan Perusahaan Multinasional (MNC), teori ini dikatakan telah mengantisipasi apa yang sekarang dikenal sebagai Globalisasi. Keohane dan Nye berpendapat bahwa di era saling ketergantungan, hakikat hubungan internasional telah berubah dan dunia menjadi lebih saling bergantung dalam segala hal, khususnya ekonomi. Teori ini mencoba mensintesis perspektif realis dan liberal. Teori ini tidak sepenuhnya menolak realisme, tetapi memunculkan kekhawatiran bahwa terkadang muncul situasi tertentu di mana asumsi/penjelasan realis tidak memadai (Keohane & Nye, 1977).

Dalam sistem '*interdependence*' ini, negara-negara bekerja sama karena hal itu merupakan kepentingan bersama mereka sendiri dan hasil langsung dari kerja sama ini adalah kemakmuran dan stabilitas dalam sistem internasional. Tidak seperti realisme, pendapat kaum neoliberal adalah bahwa politik internasional tidak dapat lagi dibagi secara sederhana menjadi politik 'tinggi' dan 'rendah'. Sementara politik tinggi keamanan nasional dan kekuatan militer masih tetap penting dan relevan, mereka berpendapat bahwa isu-isu ekonomi, sosial dan lingkungan, politik rendah merupakan prioritas tinggi dalam agenda internasional (Keohane & Nye, 1977).

Satu aspek yang sangat signifikan dari ‘Interdependensi Kompleks’ adalah bahwa hal itu merupakan kombinasi dari dua pandangan yang berlawanan, yaitu mengintegrasikan unsur-unsur politik kekuasaan dan liberalisme ekonomi. Hal itu mempertimbangkan biaya dan manfaat dari hubungan saling ketergantungan. Dalam dunia ‘Interdependensi Kompleks’, meskipun kerja sama ekonomi dan saling ketergantungan ekologis meningkat, kemungkinan terjadinya konflik militer internasional tidak dapat diabaikan. Namun, tidak seperti politik kekuasaan tradisional, dalam ‘Interdependensi Kompleks’ ini mungkin bukan permainan zero-sum. “Politik saling ketergantungan ekonomi dan ekologi melibatkan persaingan bahkan ketika manfaat bersih yang besar dapat diharapkan dari kerja sama” (Keohane & Nye, 1977).

Dalam analisis kebijakan energi Jerman, teori interdependensi membantu memahami bagaimana ketergantungan Jerman pada gas Rusia mempengaruhi kebijakan dan keputusan strategisnya, serta bagaimana konflik ini mempengaruhi hubungan bilateral dan kebijakan energi Eropa.

2.3 Kerangka Pemikiran

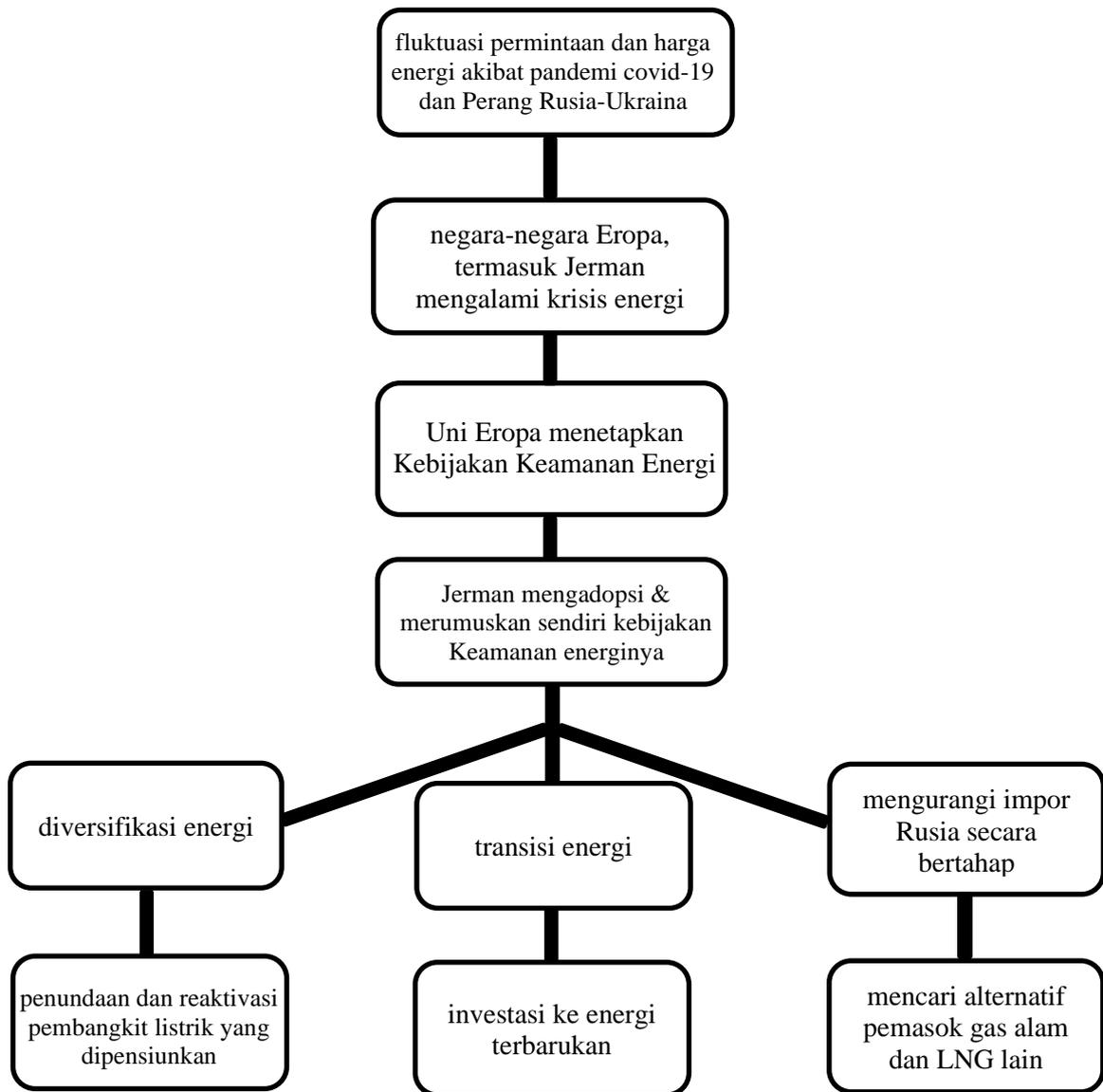
Diawali dari permasalahan ketika Rusia mengerahkan kekuatannya militer ke Ukraina pada Februari 2022 lalu yang mendapatkan perhatian dari dunia internasional yang merespons dengan menjatuhkan berbagai sanksi terhadap Rusia. Dilain pihak, Rusia juga turut memberikan sanksi terhadap negara-negara yang terlibat dengan Ukraina, yang salah satunya adalah mengurangi kuota ekspor energi dan gas dari Rusia serta meminta pihak-pihak terkait untuk membayarnya dengan mata uang Rubel Rusia.

Harga komoditas energi yang meningkat seiring dengan berangsur pulihnya ekonomi global pasca Covid-19, kini semakin menjadi tak terkendali akibat ketidaksiapan pemasok energi dalam memenuhi permintaan global. Negara-negara Eropa mengalami *dilemma* ketika menghadapi krisis energi akibat berkurangnya pasokan dari Rusia dan tingginya harga komoditas energi, namun harus lepas dari ketergantungan akan impor dari Rusia yang selama ini menggunakan energi sebagai alat politik untuk menekan Uni Eropa sekaligus

untuk membiayai operasi militernya di Ukraina.

Oleh karena itu, Uni Eropa sebagai supranasional, perlu merumuskan kebijakan keamanan energinya sekaligus mengkaji kembali kebijakan energi yang ada saat ini secara kolektif, sehingga kebutuhan energi tiap negara anggota bisa tetap terpenuhi, terjangkau, dan stabil di tingkat regional. Setiap negara anggota memiliki perwakilannya di Parlemen Eropa, dan setiap perumusan kebijakan, termasuk kebijakan keamanan energi, kementerian terkait hingga kepala pemerintahan masing-masing negara tentu ikut terlibat untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil nantinya benar-benar merupakan kebijakan kolektif yang menguntungkan seluruh pihak tanpa mengorbankan kepentingan satu anggota pun.

Jerman sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa tentu akan mengambil kebijakan yang tidak bertentangan dengan komitmen dan kepentingan kolektif Uni Eropa dalam usahanya mengatasi krisis energi. Setiap kebijakan yang diambil Uni Eropa pun adalah mutlak hukumnya untuk dipatuhi, tentu selama itu tidak bertentangan dengan kepentingan nasional Jerman. Oleh karena itu, selain dari internal pemerintahannya, kebijakan keamanan energi Jerman juga bersumber dari hasil keputusan Komisi Eropa yang sudah melalui diskusi dan persetujuan bersama



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
Sumber: Diolah oleh penulis

III. METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menyediakan penjelasan metodologis yang digunakan oleh peneliti. Bab ini terbagi ke dalam lima bagian, yaitu: jenis penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif, dengan fokus penelitian yaitu pada Kebijakan Keamanan Energi Jerman Dalam Menghadapi Krisis Energi Akibat Konflik Rusia-Ukraina Pada Tahun 2022. Sumber data yang dijadikan acuan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah sumber-sumber sekunder. Data dan fakta dikumpulkan dengan teknik studi literatur yang dianalisis untuk kemudian disajikan dan ditarik kesimpulannya berdasarkan data yang diperoleh.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendeskripsian dan analisis mengenai fenomena, aktivitas sosial, peristiwa, kepercayaan, sikap, persepsi, dan hasil pemikiran individu maupun kelompok. Jenis penelitian ini dipilih karena dianggap dapat mendukung penelitian dalam melakukan interpretasi mengenai peningkatan konflik antara Rusia dan Ukraina yang pada akhirnya menyebabkan krisis energi di Jerman. Kemudian, data dari berbagai sumber yang diperoleh oleh penelitian baik dalam bentuk numerik dilakukan pengolahan data oleh peneliti dengan memperkaya dan diperdalam melalui analisis dengan objektivitas argumen peneliti yang menentukan mengenai keabsahan penelitian.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini membuat batasan cakupan ruang penelitian yang didasar

untuk membantu peneliti agar tidak meluas dari pembahasan yang seharusnya dengan menentukan fokus penelitian pada skripsi ini. Fokus penelitian ini adalah melihat bagaimana kebijakan keamanan energi yang dilakukan oleh Jerman terhadap konflik Rusia-Ukraina yang mengakibatkan krisis energi Jerman dalam periode tahun 2022. Kemudian, Uni Eropa berperan penting dalam penelitian ini dikarenakan Uni Eropa merupakan organisasi antarpemerintah dan supranasional di mana Jerman tergabung di dalamnya, sehingga seluruh kebijakan yang diambil Jerman, baik politik, keamanan, dan perdagangan, termasuk keamanan energi, harus sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku di Uni Eropa. Meskipun begitu tidak menutup adanya penggunaan data di luar jangka waktu yang ditetapkan untuk mendukung penelitian.

3.3 Jenis dan Sumber Data

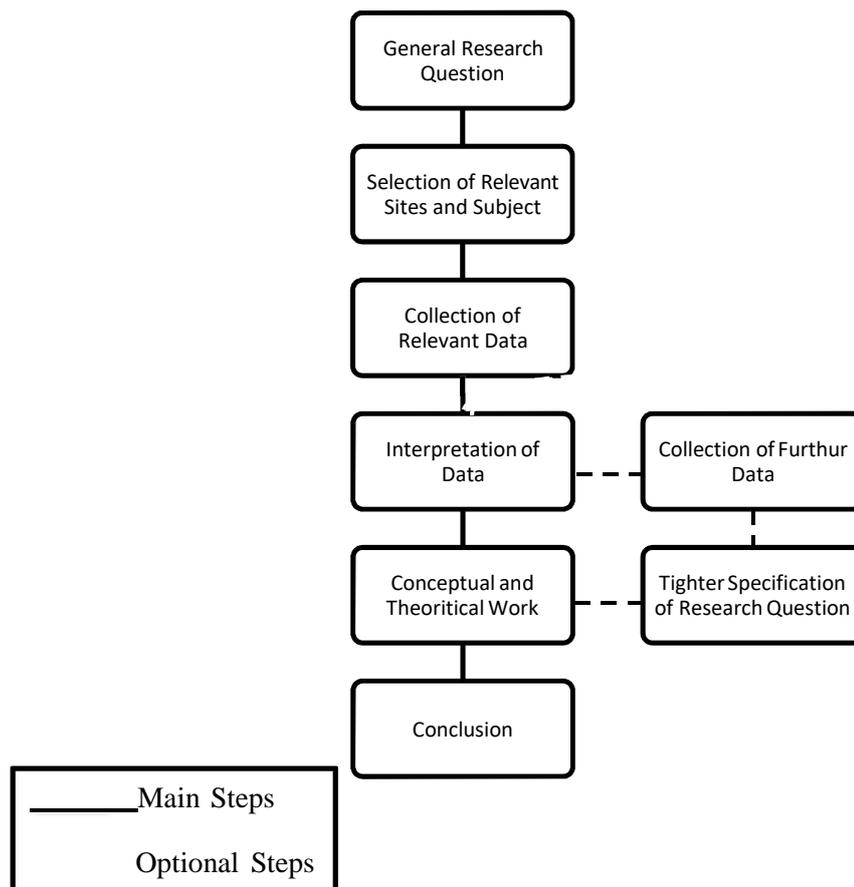
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder yang didapatkan dari berbagai sumber tertulis yang tersedia antara lain jurnal, buku, laporan tahunan, berita dan sumber-sumber lainnya. Secara spesifik untuk data utama dalam penelitian ini berdasarkan, laporan dari *The Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen* (Clean Energy Wire) yang digunakan sebagai sumber data mengenai *energy consumption* tahunan Jerman. Laporan dari *International Energy Agency* (IEA) yang digunakan sebagai sumber data konsumsi energi Jerman dan Uni Eropa, data kenaikan harga komoditas energi, serta berbagai kebijakan yang diambil Uni Eropa dan Jerman selama krisis, termasuk yang bekerja sama dengan IEA secara langsung. Penulis juga menggunakan website resmi Uni Eropa dengan berbagai domain (<https://european-union.europa.eu>, <https://commission.europa.eu>, <https://www.europarl.europa.eu>, dan juga <https://energy.ec.europa.eu>). Selain itu, berbagai data mengenai kebijakan yang diambil oleh pemerintah Jerman juga diambil dari website resmi pemerintah Jerman dan Deutsche Welle (DW), sebuah perusahaan penyiaran informasi dan berita asal Jerman, serta dokumen resmi dari *World Bank*.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian *indirect* non-reaktif, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah melalui studi pustaka. Data-data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang tersedia seperti jurnal, buku, laporan tahunan, berita dan situs resmi pemerintah berkaitan dengan penelitian ini seperti laporan dari *Clean Energy Wire*, IEA, laman resmi Uni Eropa dan pemerintah Jerman, laporan dan berita dari DW, serta laporan *World Bank*. Data-data yang telah di telusuri oleh peneliti dikaitkan dengan konsep dan teori yang digunakan.

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis berdasarkan Bryman penelitian kualitatif sebagai berikut :



Gambar 3.1 Teknik Analisis Data

Sumber: Buku “*Social Research Methods, 4th Edition*” yang ditulis oleh Alan Bryman

General research question pada penelitian kualitatif merupakan pertanyaan umum penelitian mengenai orientasi dan arah penelitian yang memiliki inti mengenai pertanyaan penelitian adalah apa yang ingin diketahui oleh peneliti dan seberapa penting hasil jawaban mengenai penelitiannya. Dilanjutkan dengan memilih subjek yang relevan sehingga dapat membantu peneliti dalam menjawab pertanyaan penelitian. Lalu, peneliti mengumpulkan data yang relevan dengan penelitiannya serta melakukan interpretasi data dengan bantuan konsep dan teori yang penelitian sudah tentukan. Sehingga, peneliti mendapatkan hasil penelitian berupa tulisan karya ilmiah. Namun, jika dalam tahapan interpretasi data peneliti mengalami hambatan atau keraguan maka peneliti diharuskan melakukan pengumpulan data secara lebih lanjut dan mempersempit pertanyaan penelitian kemudian, menginterpretasikan data dengan teori dan konsep sehingga mendapatkan hasil penelitian yang lebih optimal, Metode penelitian ini dipilih oleh peneliti dikarenakan mendukung langkah penelitian yang dilakukan dengan secara optimal dan relevan bagi peneliti

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Jerman telah melakukan berbagai langkah strategis dan adaptif untuk menjaga ketahanan energi nasionalnya. Krisis ini menjadi titik balik penting dalam kebijakan energi Jerman, di mana ketergantungan yang tinggi terhadap impor gas alam dari Rusia terbukti menjadi kelemahan struktural yang signifikan. Ketika pasokan gas Rusia terganggu akibat konflik dan sanksi ekonomi, Jerman menghadapi ancaman serius terhadap stabilitas pasokan energi, lonjakan harga energi, serta tekanan ekonomi dan sosial yang luas.

Sebagai respons, pemerintah Jerman mengadopsi kebijakan diversifikasi sumber energi secara agresif. Langkah ini meliputi peningkatan impor gas alam cair (LNG) dari negara-negara alternatif seperti Norwegia, Belanda, Amerika Serikat, dan Qatar, serta percepatan pembangunan infrastruktur LNG domestik, termasuk terminal-terminal baru dan unit regasifikasi terapung (FSRU). Selain itu, Jerman juga memperkuat kerja sama energi dengan negara-negara Eropa lainnya untuk memastikan solidaritas dan keamanan pasokan lintas batas.

Di sisi lain, Jerman juga mempercepat transisi energi menuju sumber energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, dan biomassa, sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil impor. Pemerintah memperkenalkan berbagai insentif dan regulasi untuk mendorong investasi di sektor energi terbarukan, meningkatkan efisiensi energi, serta memperluas elektrifikasi di sektor transportasi dan pemanas. Namun, dalam situasi darurat, Jerman juga mengambil keputusan pragmatis dengan mengaktifkan kembali pembangkit listrik tenaga batu bara dan menunda penutupan beberapa pembangkit nuklir untuk memastikan pasokan

listrik tetap aman selama musim dingin.

Kebijakan keamanan energi Jerman selama krisis ini juga menekankan pentingnya perlindungan sosial bagi masyarakat. Pemerintah meluncurkan paket bantuan ekonomi untuk meringankan beban rumah tangga dan pelaku usaha akibat lonjakan harga energi, serta mengatur regulasi harga dan subsidi energi. Upaya ini menunjukkan bahwa kebijakan energi tidak hanya berorientasi pada aspek teknis dan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial dan keadilan transisi energi.

Pengalaman krisis ini memperkuat komitmen Jerman terhadap ketahanan energi, diversifikasi sumber energi, dan percepatan transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan. Ke depan, pelajaran dari krisis ini diharapkan dapat memperkuat fondasi kebijakan energi Jerman agar lebih tangguh, mandiri, dan responsif terhadap tantangan geopolitik dan perubahan iklim global.

5.2 Saran

Dari penelitian ini, penulis menyarankan agar pemerintah Jerman terus memperkuat strategi diversifikasi sumber energi sebagai upaya jangka panjang untuk menjaga ketahanan energi nasional. Diversifikasi tidak hanya perlu difokuskan pada mencari pemasok gas alam dan LNG alternatif, tetapi juga harus diiringi dengan percepatan pengembangan energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, dan hidrogen hijau. Pemerintah juga perlu memberikan insentif dan dukungan kebijakan yang lebih kuat untuk investasi di sektor energi bersih, serta mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung, agar transisi energi berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah Jerman disarankan untuk memperkuat kerja sama internasional, baik di tingkat bilateral maupun multilateral, guna memastikan keamanan pasokan energi dalam menghadapi ketidakpastian geopolitik global. Kerja sama dengan negara-negara Eropa dan mitra strategis di luar Eropa perlu terus ditingkatkan, terutama dalam hal pertukaran teknologi, pembangunan jaringan energi lintas batas, serta pengelolaan cadangan energi bersama. Upaya ini penting untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu negara pemasok dan meningkatkan solidaritas energi di kawasan Eropa.

Terakhir, dalam proses transisi energi dan penyesuaian kebijakan energi nasional, pemerintah Jerman perlu memperhatikan aspek keadilan sosial dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Kebijakan subsidi, bantuan langsung, dan regulasi harga energi harus terus dievaluasi agar tetap mampu melindungi masyarakat dari dampak fluktuasi harga energi dan potensi krisis di masa depan. Keterlibatan masyarakat dan pelaku industri dalam proses perumusan kebijakan juga perlu ditingkatkan agar tercipta solusi yang inklusif, efektif, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat Jerman.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Gheorghe, Liviu Muresan. 2011. *Energy Security: International and Local Issues, Theoretical Perspectives, and Critical Energy Infrastructures*. Springer.

Behnam Zakeri, Katsia Paulavets, Leonardo Barreto-Gomez, Luis Gomez Echeverri, Shonali Pachauri, Benigna Boza-Kiss, Caroline Zimm, Joeri Rogelj, Felix Creutzig, Diana Ürge-Vorsatz et al. 2022. *Pandemic, War, and Global Energy Transitions*. Energies.

Bryman, Alan. 2012. *Social Research Methods, 4th Edition*. New York: OXFORD University Press.

Buttermann, Hans Georg. 2023. *Energy Consumption in Germany 2022*. Berlin: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V.

Esakova, Nataliya. 2012. *European Energy Security_ Analysing the EU-Russia Energy Security Regime in Terms of Interdependence Theory*. Frankfurt: Springer VS.

Iriawan, Hermanu. 2024. *Teori Kebijakan Publik*. Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup

Abdul Wahab, Solichin. 1991. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Dye, Thomas R. 2013. *Understanding public policy/ Thomas R. Dye. - 14th ed.* New Jersey: Pearson Education

Abdoellah, Awan Y., and Yudi Rusfiana. 2016. *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA

Adam A. Anyebe. 2018. *An Overview of Approaches to the Study of Public Policy*. International Journal of Political Science

Rinfret, S. R., Scheberle, D., & Pautz, M. C. 2019. *Public Policy: A Concise Introduction*. SAGE Publications. (hal 29-51)

Keohane, Robert O., and Joseph S. Nye. 1977. *Power and Interdependence : World Politics in Transition*. Boston: Little, Brown.

Juliardy, Muhammad Andryan. 2023. Masa Depan Gas Alam dan Ekonomi Jerman dalam Konstelasi Perang Rusia-Ukraina. *Jurnal Sentris* 34-45.

Paraschiv, Christoph Halser and Florentina. 2022. Pathways to Overcoming Natural Gas Dependency on Russia-The German Case. *Energies* 2022 1-24.

Paul D. Williams, Matt McDonald. 2018. *Security Studies_ An Introduction 3rd edition*. New York: Routledge.

Helm, Dieter. 2002. *Energy policy: security of supply, sustainability and competition*. Energi Policy. Elsevier Science

Misiągiewicz J. 2022. *Energy security as a research area of international security*. Stosunki Miedzynarodowe - International Relations

Peter Hough, Shahin Malik, Andrew Moran, Bruce Pilbeam. 2020. *International Security Studies: Theory and Practice*. New York: Routledge.

Surwillo, Izabela. 2019. *Energy Security Logics in Europe_ Threat, Risk or Emancipation*. New York: Routledge.

Szulecki, Kacper. 2018. *Energy Security in Europe_ Divergent Perceptions and Policy Challenges*. Oslo: Springer Nature.

Worldbank.org. Energy Imports, Net (% of energy use)
<https://data.worldbank.org/indicator/EG.IMP.CON.S.ZS?locations=DE>

Clean Energy Wire. 2025. Germany's Energiewende – The Easy Guide.
<https://www.cleanenergywire.org/easyguide#>

BMWK. Second Energy Security Progress Report; BMWK: Berlin, Germany, 2022.

BP. 2021. BP Statistical Review of World Energy 2021
<https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2021-full-report.pdf>

Azzuni, A.; Breyer, C. *Definitions and dimensions of energy security: A literature review*. Wiley Interdiscip. Rev. Energy Environ. 2018

IEA. 2020. Global Energy Review 2020 The impacts of the Covid-19 crisis on global energy demand and CO2 emissions

IEA. 2021. Global Energy Review 2021 Assessing the effects of economic recoveries on global energy demand and CO2 emissions in 2021
<https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2021>

IEA. 2022. Evolution of energy prices, Oct 2020-Jan 2022
<https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/evolution-of-energy-prices-oct-2020-jan-2022>

De Rosa, M.; Gainsford, K.; Pallonetto, F.; Finn, D.P. Diversification, concentration and renewability of the energy supply in the European Union. Energy 2022

Blondeel, M.; Bradshaw, M.J.; Bridge, G.; Kuzemko, C. *The geopolitics of energy system transformation: A review*. Geogr. Compass 2021

AGSI. *Aggregated Gas Storage Inventory; Gas Infrastructure Europe (GIE)*: Brussels, Belgium, 2022

European Commission. *Factsheet on Gas Storage Proposal. Refilling Gas Storage for Next Winter*; European Commission: Brussels, Belgium, 2022.

European Commission. 2022. The European Union; What it is and what it does, <https://op.europa.eu/webpub/com/eu-what-it-is/en>

Center for European Studies. 2022. Teaching the EU Toolkits – The Center for European Studies at The University of North Carolina at Chapel Hill <https://europe.unc.edu/toolkits/C>

Zensus. 2022. Persons: Citizenship (countries)
<https://ergebnisse.zensus2022.de/datenbank/online/statistic/1000A/table/1000A-1023>

Clean Energy Wire. 2022. German government agrees wide-ranging energy price relief for consumers, <https://www.cleanenergywire.org/news/german-government-agrees-wide-ranging-energy-price-relief-consumers>

Clean Energy Wire. 2022. Germany lowers petrol and public transport prices to relieve citizens, <https://www.cleanenergywire.org/news/germany-lowers-petrol-and-public-transport-prices-relieve-citizens>

BMWK Newsletter Energiewende. 2022. How can we get away from gas?
<https://www.bmwk-energiewende.de/EWD/Redaktion/EN/Newsletter/2022/03/Meldung/direkt-finds-get-away-from-gas.html>

Clean Energy Wire. 2022. German govt takes next step to reactivate hard coal plants for supply security in gas crisis
<https://www.cleanenergywire.org/news/german-govt-takes-next-step-reactivate-hard-coal-plants-supply-security-gas-crisis>

BMWE. 2022, First replacement power plants can return to the electricity market and contribute to gas savings – Federal Cabinet adopts ordinance on grid reserve

<https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2022/07/20220713-erste-ersatzkraftwerke-konnen-an-den-strommarkt-zuruckkehren-und-beitrag-zur-gaseinsparung-leisten.html>

Deutsche Welle. 2022. Germany reactivates coal-fired power plant to save gas

<https://www.dw.com/en/germany-reactivates-coal-fired-power-plant-to-save-gas/a-62893497>

European Association for Coal and Lignite. 2022. Powering Transition In

Europe <https://euracoal.eu/info/country-profiles/germany-8>